

PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pendirian partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan ketentuan tersebut dalam rangka membatasi pendirian partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan mengenai pendirian partai politik di Indonesia merupakan wujud dari nilai demokrasi, bahwa negara memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk dapat berkumpul dan berserikat melalui partai politik. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur pendirian partai politik yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal memasukkan substansi demokrasi, transparansi dan unsur integritas. 2) Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang yang mengatur pendirian partai politik tersebut diharapkan dapat dimasukkan ketentuan yang bersubstansi nilai demokrasi, pembaharuan pada bidang pembiayaan atau pendanaan partai politik dengan melihat ketentuan negara lain seperti Negara Jerman. Dalam menentukan rumusan hukum pendirian partai politik, maka pembentuk undang-undang dapat melihat rekomendasi regulasi Negara Jerman dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Pengaturan; Penyederhanaan; Partai Politik.

REGULATION OF THE ESTABLISHMENT OF POLITICAL PARTIES AS AN EFFORT TO SIMPLIFY POLITICAL PARTIES IN INDONESIA

ABSTRACT

The aims of this research are: 1) To find out and analyze the provisions for establishing political parties in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. 2) To find out and analyze the advantages and disadvantages of these provisions in order to limit the establishment of political parties. The method used in this research is a normative research method with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The research results show that 1) Regulations regarding the establishment of political parties in Indonesia are a manifestation of democratic values, that the country provides opportunities for all its people to gather and associate through political parties. However, the provisions governing the establishment of political parties regulated in Law No. 2 of 2011 still have several shortcomings in terms of including the substance of democracy, transparency and elements of integrity. 2) Given the shortcomings in the Law governing the establishment of political parties, it is hoped that provisions that have democratic values, reform in the field of political party financing or funding can be included by looking at the provisions of other countries such as Germany. In determining the legal formulation for the establishment of a political party, legislators can look at the recommendations of German state regulations while still being guided by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.

Keywords: Setting; Simplification Efforts; Political parties.